

PERAN PASUKAN GARUDA DALAM OPERASI PENGAWASAN PERDAMAIAN PADA KONFLIK ANTARA ISRAEL-HIZBULLAH TAHUN 2014-2015

Ninda Wahyu Ardani, Ganjar Widhiyoga, Hasna Wijayati
 Universitas Slamet Riyadi Surakarta
 Email : nindawahyuardani@gmail.com

ABSTRAK

Pengiriman Pasukan Garuda di Lebanon yang tergabung dalam pasukan pemelihara perdamaian UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) merupakan perwujudan atas nilai-nilai yang ada pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV. Hal ini sekaligus memenuhi kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas-aktif dengan Visi Nawa Cita di era pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014-2015. Pengiriman Pasukan Garuda dikirim untuk melakukan operasi pengawasan perdamaian pada konflik antara Israel-Hizbullah di Lebanon 2014-2015. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pasukan Garuda dalam operasi pengawasan perdamaian pada konflik antara Israel-Hizbullah di Lebanon pada tahun 2014-2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan telaah pustaka dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis menggunakan teori kemanan internasional non tradisional dengan fokus konsep human security dan diplomasi pertahanan. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasukan Garuda yang berperan dalam operasi pengawasan perdamaian pada konflik antara Israel-Hizbullah di Lebanon pada tahun 2014-2015 lebih berperan terhadap upaya preventif agar tidak memunculkan konflik baru. Hal tersebut dilakukan dengan penyediaan perlindungan dan dukungan kemanusiaan terhadap penduduk lokal.

Kata kunci: Pasukan Garuda, Keamanan Internasional, Diplomasi Pertahanan

ABSTRACT

The deployment of Garuda Troops in Lebanon who are members of UNIFIL is an embodiment of the values of the opening of the fourth paragraph of the 1945 Constitution and fulfills Indonesia's free-active foreign policy with the Nawa Cita Vision in the Jokowi-JK era 2014-2015. Garuda troops was sent to conduct peacekeeping operations of Israel-Hezbollah conflict in Lebanon in 2014-2015. This study aims to analyze the role of the Garuda Troops in peacekeeping operations in the Israel-Hezbollah conflict in Lebanon in 2014-2015. This study uses a qualitative research method with a library research and uses a qualitative descriptive analysis. The analysis uses non-traditional international security theory with a focus on the concept of human security and defense diplomacy. From this analysis, it can be concluded that the Garuda Troops who played a role in peacekeeping operations in the Israel-Hezbollah conflict in Lebanon in 2014-2015 played more of a role in preventive efforts so as not to create new conflicts. This is done by providing protection and humanitarian support to the local community

Keywords: Garuda Troops, International Security, Defence Diplomacy

PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Lebanon sudah terjalin sejak Lebanon mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lebanon menjadi negara ketiga yang mengakui Indonesia merdeka setelah Mesir dan Suriah. Keikutsertaan Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia terutama di kawasan Timur Tengah seperti Lebanon merupakan salah satu perwujudan dari politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif (Supardi, 2017). Indonesia aktif dalam kegiatan internasional seperti mengirimkan

Kontingen Garuda dalam konflik Israel-Hizbullah di bawah mandat PBB yang dimulai sejak tahun 1957. Hal tersebut juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang bertujuan untuk turut serta dalam pemeliharaan perdamaian di dunia internasional (Kartini, 2012).

Politik luar negeri dengan prinsip bebas aktif memiliki arti bahwa politik luar negeri bertujuan untuk merealisasikan cita-cita nasional. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir ikut serta dalam ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Meskipun dalam perwujudan perdamaian dan ketertiban dunia dinilai sebagai cita-cita yang bersifat eksternal akan tetapi politik luar negeri tersebut turut serta dalam pencapaian kepentingan nasional (Situmorang, 2015).

Pada April 2014 Indonesia menyelenggarakan pemilu dan Jokowi terpilih sebagai presiden dengan Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Di awal kepemimpinannya sebagai Presiden, Jokowi memiliki visi Nawa Cita. Nawa berarti sembilan dan Cita berarti harapan atau tujuan. Dalam visi tersebut merupakan reaktualisasi dari Trisakti, UUD 1945 dan Deklarasi Djuanda. Pada intinya apabila digabungkan, dalam politik luar negeri RI akan menonjolkan identitas sebagai negara kepulauan yang mampu menjalankan diplomasi dalam kerjasama internasional dan keterlibatan global secara selektif. (Haryono, 2017). Diplomasi pada konteks ini adalah diplomasi pertahanan yang dilaksanakan oleh TNI untuk mendukung kebijakan politik luar negeri serta mendukung penyelesaian berbagai isu internasional. Diplomasi pertahanan dimaknai sebagai sistem pertahanan preventif yang secara keseluruhan terarah dan berjangka panjang (Prasetyo, 2018).

Dengan prinsip Nawa Cita dan amanat pembukaan UUD 1945 yang ada di dalamnya, Indonesia terus melakukan upaya memelihara perdamaian dan keamanan dunia baik secara bilateral, regional, maupun internasional salah satunya dengan mengirimkan Pasukan Garuda di Lebanon. Dengan begitu hal tersebut akan meningkatkan citra diplomasi Indonesia di mata dunia internasional. Selain hal tersebut target yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya akan terealisasi (Bappenas, 2006).

Pada Desember 2014 Indonesia mengirimkan sejumlah 1.169 prajurit TNI dari seluruh angkatan baik darat, udara, maupun laut untuk diberangkatkan dalam misi perdamaian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ke Lebanon. Panglima TNI Jenderal Moeldoko melepas Satgas (Satuan Tugas) TNI di Lebanon untuk satu tahun kedepan yang tergabung dalam UNIFIL (*United Nation Interim Force in Lebanon*). Di sana Pasukan

Garuda ditugaskan dalam misi perdamaian sebagai *peacekeeper* di Lebanon. Dalam misi perdamaian ini Komando Satgas Indonesia Batalyon (Indobatt) dipimpin oleh Mayor Inf. Andreas (Puspen TNI, 2015). Menurut Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 2006 tentang Kontingen Garuda dalam operasi pengawasan perdamaian di Lebanon, Pasukan Garuda akan mengemban tugas selama satu hingga dua periode masa tugas atau selama enam bulan hingga satu tahun menyesuaikan permintaan dari DK PBB (RI, 2021).

Pengiriman misi perdamaian di Lebanon oleh PBB dalam UNIFIL dikarenakan di wilayah tersebut masih sering terjadi konflik bahkan bisa terjadi dikarenakan oleh hal kecil maupun kesalahpahaman dan masih berlanjut hingga saat ini dalam waktu yang tak terduga (Firman, 2017). Dengan mengirimkan Pasukan Garuda di Lebanon sama halnya dengan mewujudkan tujuan kebijakan luar negeri Jokowi-JK yaitu memberi dukungan dan penyelesaian terhadap negara-negara yang memiliki potensi sengketa (Situmorang, 2015).

Melihat fenomena tersebut, peneliti berupaya menganalisis mengenai peran Pasukan Garuda dalam menjaga perdamaian pada konflik Israel-Hizbullah di Lebanon dengan mengirimkan Pasukan Garuda pada tahun 2014-2015. Melalui penelitian ini, diharapkan pembaca dapat memperkaya kajian tentang diplomasi pertahanan serta dapat mengambil manfaat yang ada pada penelitian dan dijadikan sebagai pembelajaran dan wawasan.

KERANGKA ANALISIS

Keamanan Internasional

Keamanan merupakan sesuatu yang perlu diutamakan bangsa, negara, individu, kelompok etnis, serta lingkungan itu sendiri. Baik dalam bentuk *national security*, atau *international security*, bangsa/negara merupakan objek rujukan analitis dan normatif. Konsep keamanan internasional tercipta saling beriringan dengan konsep keamanan nasional dan akhirnya saling mempengaruhi, bukan menggantikan (Buzan B. &., 2009). Keamanan adalah suatu teori dimana ancaman teritorial yang menjadi logika utama dan berkaitan kuat. Tapi tidak dipungkiri bahwa ancaman non-teritorial juga akan muncul (Buzan B. &., 2003).

Munculnya konsep keamanan ini tidak sepenuhnya tak terbantahkan. Selama terjadinya Perang Dingin, peneliti perdamaian mengungkapkan bahwa perlunya memberikan prioritas yang sama untuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian keamanan internasional semakin dikembangkan menjadi keamanan sektoral yang lebih umum. Hal tersebut mencakup sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan, pembangunan, dan gender (Buzan B. &., 2009). Keamanan internasional memiliki agenda khusus, dalam keamanan

internasional membantu memayungi perbedaan domestik-internasional dengan mendefinisikan keamanan dalam kaitannya dengan ancaman eksistensial. Dengan hal itu makna dari keamanan internasional itu sendiri ialah untuk kelangsungan hidup (Booth, 2007).

Seiring berjalannya waktu Keamanan Internasional dibedakan menjadi dua yaitu Keamanan Internasional Tradisional dan Non-Tradisional. Keamanan Tradisional didominasi oleh pemikiran yang mengarah ke dalam dimensi tradisional dalam menanggapi isu keamanan dan ancaman dari luar serta bagaimana negara memperkuat diri dalam upaya menghadapi ancaman militer. Dalam perspektif tradisional hanya *state actor* yang memiliki kekuatan serta kewajiban dalam upaya pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara (Susetyo, 2008).

Munculnya tantangan seperti perubahan iklim global, *human trafficking*, migrasi ilegal, kejahatan transnasional, dan terorisme beresonansi menjadi ancaman baru dalam keamanan non-tradisional. Isu mengenai keamanan non-tradisional meliputi: ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan serta kemanusiaan (Park, 2013). Akibatnya, negara-negara terpaksa mengevaluasi kembali pendekatan mereka terhadap tata kelola keamanan regional. Kemudian hal tersebut memperluas dan memperdalam perspektif dan tantangan keamanan yang terkait dengan keamanan non-tradisional (Zimmerman, 2016).

Dalam teori Keamanan Internasional non-tradisional terdapat konsep *Human Security*. *Human Security* menunjukkan dualitas dari *State Actor* dan *Non-State Actor* tentang hak asasi manusia yang terkait dengan keamanan manusia. *Human Security* merupakan tantangan bagi *State* dan *Non-State Actor* secara beriringan dan seimbang (Šehović, 2018). Konsep ini memiliki dua komponen utama yaitu *freedom from fear* yang mencakup kebutuhan identitas dikarenakan kurangnya kapasitas negara, terorisme, kejahatan perang, dan ketidakadilan lainnya. *Freedom from want* mencakup ancaman lebih luas yang disebabkan oleh kelaparan, kemiskinan, penyakit, dan bencana alam. Dengan itu *Human Security* ada untuk memberi perlindungan dan pemberdayaan pada individu dan kolektif yang rentan terhadap ancaman dan bahaya (Hanlon, 2016).

Diplomasi Pertahanan

Diplomasi merupakan sarana utama di mana negara-negara saling berkomunikasi satu sama lain. Hal itu memungkinkan bagi mereka untuk memiliki hubungan yang lebih kompleks. Dalam sebuah negara yang berdaulat, kemampuan dalam berkomunikasi serta

berhubungan dengan negara lain merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan diplomasi (Berridge, 2001). Terdapat berbagai macam diplomasi yang ada, salah satunya adalah diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan merupakan instrumen negara yang multifungsi dengan meningkatkan kapasitas diplomatik dan keamanan suatu negara. Esensi dari diplomasi pertahanan mampu mempengaruhi dan membentuk lingkungan menjadi lebih positif di kehidupan masa depan (Blannin, 2017).

Istilah diplomasi pertahanan pertama kali dibentuk setelah berakhirnya Perang Dingin. Didorong oleh kebutuhan dan fungsi politik yang baru untuk menciptakan lingkungan yang damai oleh angkatan bersenjata dan kepemimpinan Kementerian Pertahanan Negara (Drab, 2018). Perspektif mengenai diplomasi pertahanan lebih luas dan tidak hanya berfokus pada penggunaan militer untuk memajukan diplomasi dan keterlibatannya dalam berbagai pengaturan keamanan. Diplomasi pertahanan ditujukan untuk meningkatkan hubungan melalui jalur informal dan formal dengan menggunakan sumber daya pemerintah dan non-pemerintah (Laksmiana, 2011).

Tujuan dari diplomasi pertahanan yaitu memelihara perdamaian dengan pencegahan dan penyelesaian terhadap terjadinya suatu konflik serta memberikan kesan positif terhadap subjek yang melakukannya. Ada dua jenis keterlibatan yang dapat dilakukan oleh negara dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Opsi pertama yaitu menjadi anggota PBB dengan memberikan bantuan dana untuk menyokong aktivitas perdamaian. Opsi kedua yaitu dengan mengirimkan pasukan perdamaian secara langsung ke wilayah yang sedang terjadi konflik atau bersengketa di bawah kepemimpinan PBB (Sudarsono, 2018).

Diplomasi pertahanan menjadi alat penting bagi kebijakan luar negeri dan dianggap sebagai kebijakan keamanan. Diplomasi pertahanan merupakan hasil dari tiga perkembangan penting. Pertama, pemahaman tentang tantangan keamanan di antara negara-negara telah berkembang. Kedua, negara tidak lagi disibukkan dengan tantangan tradisional (militer), tetapi juga tantangan non-tradisional (non-militer) seperti pangan, iklim, lingkungan, ekonomi, dan lain-lain. Ketiga, peran militer telah berkembang setelah Perang Dingin. Dampak dari tantangan keamanan baru, mendiversifikasi misi utama militer dari fokus tradisional pertempuran perang menjadi beragam peran baru, seperti penjaga perdamaian, bantuan bencana dan keterlibatan yang lebih besar, dalam upaya diplomasi pertahanan (Singh, 2011).

Kerjasama pertahanan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan yang lebih luas. Aktivitas yang ada dalam diplomasi pertahanan meliputi perjanjian kerjasama bilateral atau multilateral di bidang pertahanan, pelatihan personel atau pertukaran personel pertahanan militer, kunjungan pesawat militer dan kapal perang, adanya kontak antara pejabat senior dan kementerian pertahanan, penyediaan peralatan militer dan bantuan material, mempromosikan kontrol sipil demokratis sebagai upaya untuk mendukung demokrasi dalam *good governance* serta mendukung rekan negara dalam mengembangkan kapasitas untuk memfasilitasi operasi penegakan perdamaian dan pemeliharaan perdamaian, *human rights* (Cottey, 2004).

Tidak menyatakan bahwa diplomasi pertahanan merupakan kegiatan baru, tetapi yang berbeda adalah bahwa sejumlah kegiatan yang berbeda telah disatukan, diseimbangkan, dan disajikan sebagai kegiatan inti militer yang diungkapkan dalam istilah politik. Pengaturan yang diperlukan untuk mendukung hal ini akan memerlukan perubahan yang signifikan karena hal ini dimaksudkan agar diplomasi pertahanan akan memberikan fokus baru di dalam Kementerian Pertahanan itu sendiri (Hills, 2000).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, diawali dengan menentukan topik, pengumpulan data, serta menganalisis data sehingga ditemukan pemahaman atas topik yang diangkat (Raco, 2010). Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan penulis ialah sumber data primer yang berasal dari website resmi sebagai sumber utama. Sedangkan untuk sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan artikel media massa yang memiliki kesesuaian tema dengan penelitian.

Objek penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai peran Pasukan Garuda dalam operasi pengawasan perdamaian pada konflik antara Israel-Hizbullah di Lebanon Tahun 2014-2015 serta upaya Pasukan Garuda dalam mendukung keberhasilan Indonesia dalam implementasi diplomasi pertahanan dalam keterlibatannya di UNIFIL. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah teknik telaah pustaka atau *library research*. Teknik ini merupakan pengumpulan data yang menggunakan buku, jurnal, website resmi, artikel media massa yang kredibel dan berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data proses analisis yang digunakan untuk mengklasifikasikan serta memperjelas penelitian terhadap hal-hal yang dianggap penting oleh penulis. Kemudian penyajian data dengan penulisan teks yang bersifat naratif kemudian teknik analisis data yang ketiga ialah dengan verifikasi data dengan cara mengumpulkan, menelaah, serta menyimpulkan data dari berbagai sumber penelitian yang sudah valid sehingga menjadi kesimpulan yang kredibel.

PEMBAHASAN

Pasukan Garuda

Kontingen Garuda (KONGA) atau yang kerap disebut dengan Pasukan Garuda merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian di berbagai negara di dunia atas nama PBB. Kegiatan misi perdamaian yang dilakukan oleh Indonesia juga didasari oleh pembukaan UUD 1945 yang merujuk pada upaya mewujudkan perdamaian dunia (Sudirman, 2019).

Sejarah terbentuknya Pasukan Garuda berawal dari kepentingan politik luar negeri Indonesia yang terjadi pada saat pengakuan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat oleh negara Mesir pada tanggal 18 November 1946. Kemudian Mesir mengadakan pertemuan dengan perwakilan negara anggota Liga Arab. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan sebuah ketetapan bahwa pengakuan tersebut diakui secara *de jure* menurut hukum internasional (Elgar, 2020).

Sejak tahun 1957, TNI kerap ikut dalam misi menjaga perdamaian sebagai Pasukan Perdamaian (*Peacekeeping Force*) di beberapa negara (Siar News Service, 1999). Pasukan Garuda pertama kali dikirim pada 8 Januari 1957 ke Mesir dengan tujuan menjaga perdamaian paska Krisis Terusan Suez atas misi *United Nations Emergency Force (UNEF)*. Misi tersebut dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Hartoyo yang kemudian digantikan oleh Letnan Kolonel Infateri Suadi Suromihardjo. Dengan pengiriman Pasukan Garuda tersebut, Indonesia mempunyai peran penting dalam menjaga perdamaian dunia (Hananto, 2020).

Setelah pengiriman Pasukan Garuda ke Mesir, Indonesia juga mengirimkan ke beberapa negara lainnya seperti Kongo, Vietnam, hingga wilayah Timur Tengah, salah satunya adalah Lebanon. Lebanon merupakan negara yang memiliki sejarah konflik besar yang terjadi antara pasukan Hizbullah dari Lebanon dan *Israel Defence Force (IDF)* dari Israel yang telah terjadi sejak tahun 2006 (McCormack, 2008).

Pasukan Garuda sebagai pelaksana dalam implementasi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Oleh karena itu Indonesia secara berkelanjutan mengirimkan Pasukan Garuda sebagai penjaga perdamaian ke wilayah konflik dalam misi pemeliharaan perdamaian oleh PBB. Cita-cita dan tujuan seluruh bangsa di dunia ini menginginkan hal yang sama yaitu adanya perwujudan perdamaian dunia diikuti dengan kemajuan bersama (Ariestianti, 2014).

Dalam perwujudan keamanan internasional tentu memiliki agenda khusus, seperti halnya mengirimkan Pasukan Garuda dalam operasi pengawasan perdamaian pada konflik Israel-Hizbullah di Lebanon pada tahun 2014-2015. Salah satunya dengan memayungi perbedaan domestik-internasional dalam satu wadah yaitu keamanan dalam yang berkaitan dengan ancaman eksistensial. Dengan hal itu makna dari keamanan internasional itu sendiri ialah untuk kelangsungan hidup seluruh umat manusia.

Hubungan Bilateral Indonesia-Lebanon di Bidang Militer

Indonesia dan Lebanon memiliki sejarah hubungan baik yang sudah terjalin sejak lama. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Lebanon resmi dibuka pada tanggal 29 Juli 1947 (Kemlu, 2018). Pengakuan resmi secara *de-jure* diberikan terhadap Republik Indonesia oleh Presiden Lebanon Bechara El-Khoury yang menjabat kala itu (Hananto, 2020). Lebanon merupakan Negara ke-3 yang mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka setelah Mesir dan Suriah. Untuk menjaga hubungan Indonesia-Lebanon menjadi lebih erat dapat dilakukan kegiatan saling kunjung antar petinggi kedua negara tersebut. Dengan itu Indonesia dapat mengembangkan kerjasama yang konstruktif dengan Lebanon (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Pemerintah Indonesia berupaya memberikan bantuan terbaik agar hubungan kedua negara tetap terjaga. Menteri Pertahanan Indonesia yang menjabat di era pemerintahan Jokowi-JK yaitu Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa dalam menjaga keamanan negara, tentara harus memiliki hubungan yang harmonis dengan rakyat. Sehingga jika muncul ancaman dari luar akan sukar berkembang apabila kekuatan di dalam telah terbentuk. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Lebanon Samir Moqbel yang menjabat tahun 2014-2016 berterimakasih terhadap peran Pemerintah Indonesia yang senantiasa mengirimkan Pasukan Garuda dalam menjaga perdamaian di Lebanon. Mereka juga telah mempersiapkan peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Lebanon di bidang pertahanan. Menhan Samir juga berharap agar Indonesia selalu mengirimkan Pasukan Garuda dalam memelihara

perdamaian di Lebanon. Menhan Ryamizard menerima dengan baik mengenai pengembangan kerjasama pertahanan antara kedua negara tersebut (Kemhan, 2016).

Lebanon adalah salah satu negara prioritas untuk dikunjungi, mengingat adanya prajurit TNI yang bertugas di Lebanon sebagai *peacekeeping*. Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menjabat selama dua tahun dari 2015-2017 mengatakan bahwa peluang kerjasama kedua negara sangat terbuka di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, industri, dan bidang pertahanan dan militer. Hubungan bilateral di bidang pertahanan dan militer kedua negara dapat dilakukan dengan kerja sama dan komunikasi yang baik melalui *army to army, navy to navy, dan air force to air force* (Greater, 2016).

Proses Penciptaan Perdamaian di Lebanon

Perang yang terjadi pada tahun 2006 antara *Pasukan Pertahanan Israel (IDF)* dan Hizbullah tidak diikuti oleh kesepakatan damai atau hanya proses diplomatik (Samaan, 2014). Konflik yang terjadi Israel dengan Hizbullah tidak dapat dikatakan sebagai perang, dikarenakan Hizbullah merupakan sebuah organisasi partai politik bukan sebuah negara. Maksud dari serangan angkatan bersenjata Israel ke Lebanon adalah untuk membalas dan menghancurkan Hizbullah. Konflik yang terjadi di Lebanon antara Israel-Hizbullah merupakan dampak dari konflik yang telah terjadi sebelumnya. Pihak dari Hizbullah menyatakan bahwa tindakan penculikan dan serangkaian kekerasan yang terjadi di Lebanon Selatan merupakan tindakan untuk membebaskan sebagian wilayah Lebanon dari pendudukan Israel dengan pembebasan tawanan. Sedangkan pihak Israel menyatakan bahwa tindakan militer yang dilakukannya itu merupakan tindakan mempertahankan diri dan tindakan Hizbullah yang sering mengancam dan menyerang tentara Israel di zona. Israel beranggapa bahwa Lebanon harus ikut bertanggung jawab mengingat Hizbullah merupakan partai besar di Lebanon (Bratawijaya, 2008).

Negara Indonesia telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tanggal 28 September 1950. Sebagai anggota tentu sudah menjadi kewajiban untuk mengikuti aturan atau perintah yang ada dalam PBB yaitu untuk turut serta dalam memelihara perdamaian dan keamanan secara internasional seperti yang menjadi harapan dan keinginan dari seluruh masyarakat secara internasional (Elgar, 2020). Termasuk ikut serta dalam operasi pengawasan perdamaian pada konflik Israel Hizbullah di Lebanon pada tahun 2014-2015.

Keikutsertaan Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia merupakan perwujudan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Salah satunya adalah

ikut serta dalam memelihara perdamaian di Lebanon dengan pembentukan dan pengiriman Pasukan Garuda yang tergabung dalam UNIFIL (*United Nations Interim Force In Lebanon*). Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kontingen Garuda Dalam Misi Perdamaian Di Lebanon (BPK, 2006).

Keikutsertaan Indonesia dengan mengirimkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi pengawasan perdamaian melalui Pasukan Garuda merupakan implementasi dari kebijakan politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif. Anggota TNI yang dikirimkan sebagai pasukan penjaga perdamaian merupakan putra terbaik bangsa yang terdidik dan terlatih dengan baik (Madjid, 2017). Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keputusan dan kebijakan politik negara. Salah satu tugas pokok TNI selain perang yaitu melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri (Itjen Kemenag, 2004).

Seperti yang tertulis dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tertulis bahwa “*Kerjasama internasional di bidang pertahanan merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri, sehingga tidak mengarah pada suatu Pakta Pertahanan. Kerjasama internasional dibidang pertahanan dilaksanakan baik dalam rangka pembangunan kekuatan maupun pengerahan dan penggunaan kekuatan. Kendatipun demikian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kekuatan, penggunaan produk dalam negeri merupakan prioritas. Sedangkan pengerahan dan penggunaan kekuatan dalam kerjasama internasional dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan serta diplomasi, dan untuk memecahkan masalah keamanan yang perlu untuk ditangani secara bersama. Dalam rangka ikut serta secara aktif mewujudkan perdamaian dunia, pengiriman pasukan perdamaian dilaksanakan hanya atas permintaan dan mandat dari Persatuan Bangsa-Bangsa*” (JDIH Kemenkeu, 2008).

Pertama kali Indonesia tergabung dalam UNIFIL yaitu pada tahun 2006. Terhitung sudah 15 kali sejak tahun 2006 hingga tahun 2015 Pasukan Garuda telah dikirimkan ke Lebanon. Pada tiga tahun pertama keterlibatannya dalam UNIFIL, Pasukan Garuda ditempatkan di *Blue Line* yang merupakan garis perbatasan antara Israel-Lebanon dan ditugaskan dari pasukan perdamaian PBB terbatas pada penyediaan perlindungan dan dukungan kemanusiaan terhadap penduduk lokal (Maulana, 2018).

Terdapat empat peran yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam keterlibatannya pada penyelesaian permasalahan maupun konflik luar negeri, yang pertama sebagai mediator

atau sebagai penengah yang bersikap netral terhadap pihak yang berkonflik, kedua sebagai fasilitator yaitu memberi fasilitas pada pihak yang konflik untuk berunding, ketiga sebagai partisipan yaitu terlibat langsung untuk menyelesaikan konflik dengan cara pencegahan dengan tujuan tidak muncul konflik baru salah satunya dengan cara mengirimkan Pasukan Garuda sebagai pasukan pemelihara perdamaian, yang terakhir adalah sebagai justifikator yaitu memberi validasi atau mengkonfirmasi atas penyelesaian suatu konflik (Setiawati, 2017).

Pada Desember tahun 2014, Indonesia mengirimkan 1.169 prajurit TNI dari seluruh angkatan baik darat, udara, maupun laut untuk diberangkatkan dalam misi perdamaian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ke Lebanon. Panglima TNI Jenderal Moeldoko melepas Satgas (Satuan Tugas) TNI di Lebanon untuk satu tahun kedepan yang tergabung dalam UNIFIL (*United Nation Interim Force in Lebanon*). Disana Pasukan Garuda ditugaskan dalam misi perdamaian sebagai *peacekeeper* di Lebanon. Dalam misi perdamaian ini Komando Satgas Indonesia Batalyon (Indobatt) dipimpin oleh Mayor Inf. Andreas (Puspen TNI, 2015).

Menurut Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 2006 tentang Kontingen Garuda dalam misi perdamaian di Lebanon. Pasukan Garuda akan mengemban tugas selama satu hingga dua periode masa tugas atau selama enam bulan hingga satu tahun menyesuaikan permintaan dari DK PBB (RI, 2021). Munculnya tantangan seperti perubahan iklim global, human trafficking, migrasi ilegal, kejahatan trans-nasional, dan terorisme menjadi ancaman dalam keamanan non-tradisional. Ancaman seringkali datang secara *unpredictable* sehingga masa tugas memungkinkan untuk diperpanjang sesuai kebutuhan demi mewujudkan keamanan manusia mencapai *freedom from fear*. Dampak dari ancaman tersebut Indonesia melakukan perannya memberikan bantuan berupa pengiriman pasukan perdamaian dengan keterlibatan yang lebih besar dalam upaya diplomasi pertahanan.

Dikarenakan di wilayah perbatasan Lebanon-Israel masih sering terjadi konflik bahkan bisa terjadi dikarenakan oleh hal kecil maupun kesalahpahaman dan masih berlanjut hingga saat ini dalam waktu yang tak terduga (Firman, 2017). Oleh karena itu Indonesia turut terlibat dalam penjagaan perdamaian di Lebanon dengan mengirimkan Pasukan Garuda dan hal tersebut sekaligus mewujudkan tujuan kebijakan luar negeri Jokowi-JK yaitu memberi dukungan dan penyelesaian terhadap negara-negara yang memiliki potensi sengketa (Situmorang, 2015). Seperti tujuan dari diplomasi pertahanan yaitu memelihara perdamaian

dengan pencegahan dan penyelesaian terhadap terjadinya suatu konflik serta memberikan kesan positif terhadap subjek yang melakukannya yaitu Pasukan Garuda dalam memelihara perdamaian di wilayah sengketa di perbatasan Lebanon-Israel.

Efisiensi Pengiriman Pasukan Garuda di Lebanon

Keterlibatan Indonesia dalam operasi pengawasan perdamaian dengan mengirimkan Pasukan Garuda merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kecakapan militer dan kesan positif terhadap Indonesia sebagai bentuk diplomasi pertahanan. Selain hal itu Indonesia akan mendapat fasilitas dengan pelatihan militer bersama secara gratis dikarenakan sistem penggantian dikirimkan kepada PBB. Pengiriman Pasukan Garuda yang diberikan oleh Indonesia menuai keberhasilan sehingga mendapat kesan yang positif, nama baik Indonesia terjaga. Antara pasukan dan masyarakat lokal sudah seperti teman bahkan bersahabat terbukti dengan banyak yang berteriak memanggil Pasukan Garuda dengan panggilan “Garuda”. Bagi Indonesia hal ini merupakan sebuah prestasi dari sebuah perjuangan yang dilakukan oleh Pasukan Garuda (Gumilar, 2018).

Kehadiran Pasukan Garuda di Lebanon dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia secara tidak langsung merupakan representasi dari Indonesia sebagai sebuah negara. Kemampuan Indonesia di penempatan tugasnya tidak hanya kemampuan militer karena ada syarat tertentu dalam pasukan perdamaian PBB yang ingin bagi negara yang ingin ikut terlibat. Negara yang hendak terlibat sebagai pasukan perdamaian harus memiliki kondisi militer dan kecakapan prajurit secara individu yang kompeten serta memiliki alutsista yang memadai (Rachmat, 2016).

Beberapa materi dasar yang diberikan kepada para calon pasukan perdamaian adalah materi *Culture Awareness and Respect for Diversity*. Materi tersebut secara umum bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para calon penjaga perdamaian untuk memahami tentang situasi dan kondisi budaya hingga kebiasaan di wilayah misi serta memberikan pelatihan mengenai bagaimana calon pasukan perdamaian bersikap dalam bersosialisasi dan berinteraksi serta menghormati perbedaan dengan masyarakat lokal (Madjid, 2017).

Terlepas dari itu, Pasukan Garuda yang sedang bertugas sering berimprovisasi ke arah positif mengenai sikap mereka saat dalam bertugas. Mereka memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari pelayanan masyarakat yang dilakukan Pasukan Garuda yang tergabung dalam UNIFIL dengan menggunakan *Smart Car* untuk bersosialisasi dengan

masyarakat sekitar. Mobil pintar ini berisikan edukasi bahasa, permainan yang edukatif, serta pemutaran film yang memperkenalkan Indonesia (Agusalim, 2013).

Selain itu banyak kegiatan yang dilakukan oleh Pasukan Garuda secara lebih detail yaitu terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat lokal yaitu gotong royong dalam membangun fasilitas umum seperti lapangan bola dan mengadakan *friendly match*, ikut dalam kegiatan renovasi rumah, memanen gandum, menggelar pengobatan gratis serta memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang lainnya. Dalam konteks perdamaian Pasukan Garuda terdapat sebuah tim yang bernama *Tactical Outreach* yang memiliki tugas untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian kepada masyarakat di wilayah penugasan dan pada anak-anak di sekolah-sekolah di Lebanon. Hal itu dilakukan untuk memberi pemahaman bahwa pentingnya sebuah perdamaian terhadap generasi muda hingga lanjut. Kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya untuk membuka perspektif masyarakat dalam menciptakan perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dan perintah sebagai anggota UNIFIL dalam PBB. Pemahaman mengenai garis perbatasan *Blue Line* yang merupakan wilayah perbatasan antara Lebanon dan Israel pun turut dijelaskan (Ariestianti, 2014).

Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda tanpa perencanaan yang detail pada tahun-tahun sebelumnya. Sebelum tahun 2015, Indonesia belum memiliki kebijakan luar negeri seperti *Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers*. Hal ini menjadi penyebab Indonesia inkonsisten dalam mengirimkan Pasukan Garuda terkait dengan jumlah prajurit. Pada Februari 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait keterlibatan dalam *UN-PKO (United Nations-Peacekeeping Operations)* dengan membentuk susunan *Roadmap Visi 4.000 Pasukan Penjaga Perdamaian 2015-2019*. *Roadmap* yang disusun pada tahun 2015 ini merupakan strategi politik luar negeri Indonesia, untuk dapat terus aktif dan berkontribusi pada *UN-PKO* (Dwi Apriyanti, 2020).

Dijelaskan dalam *roadmap* tersebut bahwa yang menjadi latar belakang dan tujuan Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk menambah jumlah pasukan perdamaian hingga tahun 2019 menjadi 4.000 personel sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dan mewujudkan perdamaian dunia yang mana merupakan implementasi dari amanat pembukaan UUD 1945. Hal tersebut sekaligus menjalankan politik luar negeri pada masa Jokowi yang memiliki arah berbeda

dengan pemerintahan SBY “*outward looking*” sedangkan Jokowi mengutamakan politik dalam negeri yang “*inward-looking*”. (Murwanto, 2020).

Pemerintahan Jokowi yang memiliki Visi Nawa Cita memiliki politik luar negeri yang berprinsip bebas-aktif. Makna dari prinsip tersebut memiliki dua arti yang pertama, bahwa politik luar negeri Indonesia bertujuan untuk memelihara identitas nasional, yang kedua dari prinsip bebas-aktif sebagai perwujudan cita-cita nasional sesuai yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan ikut serta menjaga perdamaian dan ketertiban dunia (Situmorang, 2015).

Visi ini mempertegas makna “bebas” bagi Indonesia dengan cara mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian nasional. Di dalamnya juga terdapat karakteristik “aktif” untuk dapat mewujudkan kemandirian nasional atas landasan kerjasama positif dan konstruktif dengan gotong-royong (Soleman, 2017). Dengan prinsip tersebut pemerintahan Jokowi-JK tidak menutup diri dalam keterlibatannya secara global. Akan tetapi Indonesia memosisikan diri dengan keterlibatan global secara selektif. Indonesia lebih bijak untuk terlibat dalam peran global yang memprioritaskan pada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa beserta rakyat Indonesia. Dalam keterlibatannya, Indonesia sekaligus menjalankan politik luar negeri Indonesia bebas-aktif dengan makna bebas menentukan arah dan aktif mengirimkan pasukan perdamaian ke negara lain dengan tidak meninggalkan identitas nasional sebagai karakter bangsa.

Manfaat Bagi Indonesia-Lebanon Melalui Pasukan Garuda di Lebanon

Bagi Indonesia perdamaian dunia merupakan mandat yang harus dipenuhi sesuai dengan pembukaan UUD 1945 serta implementasi dari politik luar negeri bebas aktif. Pengiriman Pasukan Garuda dalam memelihara keamanan dan perdamaian dunia dapat menaikkan citra sebuah negara. Selain itu, pengiriman Pasukan Garuda dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan Indonesia di Lebanon serta kepada negara-negara lain yang terlibat dalam pasukan penjaga perdamaian PBB. Indonesia mendapat respon positif dari negara lain yang terlibat dalam UNIFIL bahkan masyarakat lokal di Lebanon mengenal dan senang dengan adanya Pasukan Garuda di tengah-tengah mereka (Rachmat, 2016).

Manfaat bagi Lebanon terlihat dari kontribusi Pasukan Garuda/UNIFIL TNI dalam melaksanakan operasi perdamaian ditunjukkan dengan relatif stabilnya wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dari berbagai ancaman gangguan keamanan (Rachmat, 2016). Pihak

Lebanon berterimakasih atas dikirimkannya Pasukan Garuda yang berpartisipasi dalam UNIFIL. Masyarakat setempat merasakan manfaat bukan hanya dari segi keamanan tetapi dalam kehidupan sosial mereka (Kemlu, 2019). Dari sini dapat diartikan bahwa Indonesia dengan pemerintahan Lebanon akan terus menjalin kerjasama dan hal tersebut mendukung upaya Indonesia dalam diplomasi pertahanan.

Selain itu dengan manfaat yang diperoleh dengan berpartisipasi sebagai pasukan penjaga perdamaian dapat membantu negara untuk memenuhi tujuan politiknya. Serta persepsi bahwa kontribusi Pasukan Garuda di PBB akan memperkuat “*national prestige*” bahkan mungkin memperkuat pencalonannya untuk kursi Dewan Keamanan PBB tidak tetap dan dapat menunjang kepentingan keamanan nasional Indonesia dengan lebih luas. Hal tersebut merupakan manfaat yang dapat diperoleh Indonesia jika mengalami keberhasilan dalam kebijakan luar negeri *Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers* (Hutabarat, 2015). Manfaat yang diperoleh dengan berpartisipasi sebagai pasukan penjaga perdamaian dapat membantu negara untuk memenuhi tujuan politiknya salah satunya dalam diplomasi pertahanan dan akan menaikkan kepercayaan negara lain atas Indonesia.

KESIMPULAN

Pengiriman Pasukan Garuda yang tergabung dalam UNIFIL dikirim untuk melakukan operasi pengawasan perdamaian pada konflik Israel-Hizbullah tahun 2014-2015. Dalam melakukan tugasnya Pasukan Garuda yang berperan ini lebih berperan terhadap upaya preventif agar tidak memunculkan konflik baru. Hal tersebut dilakukan dengan penyediaan perlindungan dan dukungan kemanusiaan terhadap masyarakat lokal setempat di wilayah penugasan.

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari di tengah masyarakat Lebanon pelayanan masyarakat yang dilakukan Pasukan Garuda yang tergabung dalam UNIFIL dengan menggunakan *Smart Car* untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Mobil pintar ini berisikan edukasi bahasa, permainan yang edukatif, serta pemutaran film yang memperkenalkan Indonesia. Selain itu banyak kegiatan yang dilakukan oleh Pasukan Garuda secara lebih detail yaitu terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat lokal yaitu gotong royong dalam membangun fasilitas umum seperti lapangan bola dan mengadakan *friendly match*, ikut dalam kegiatan renovasi rumah, memanen gandum, menggelar pengobatan gratis serta memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang lainnya. Dalam konteks perdamaian Pasukan Garuda terdapat sebuah tim yang bernama *Tactical Outreach* yang memiliki tugas

untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian kepada masyarakat di wilayah penugasan dan pada anak-anak di sekolah-sekolah di Lebanon. Hal itu dilakukan untuk memberi pemahaman bahwa pentingnya sebuah perdamaian terhadap generasi muda hingga lanjut. Kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya untuk membuka perspektif masyarakat dalam menciptakan perdamaian.

Dalam melakukan operasi pengawasan perdamaian pada konflik antara Israel-Hizbullah di Lebanon sekaligus perwujudan dari salah satu kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 1945 serta tujuan dari Visi Nawa Cita di era Jokowi-JK yaitu dengan ikut serta menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang dipegang Indonesia membuat Indonesia senantiasa terlibat secara aktif dalam memelihara perdamaian di dunia. Sehingga menaikkan citra positif di mata dunia internasional dalam kontribusinya dalam perwujudan perdamaian di dunia.

Untuk semakin memperkuat strategi politik luar negeri Indonesia, untuk dapat terus aktif dan berkontribusi dalam pemeliharaan perdamaian dunia kini Indonesia merencanakan maksud dan tujuannya dalam mengirimkan Pasukan Garuda dengan lebih detail dan spesifik. Target untuk mencapai 4000 *Peacekeepers* pada tahun 2015- 2019 diharapkan akan menuai keberhasilan. Susunan target dibuat dengan tujuan jika target terpenuhi dengan harapan tercapainya misi Indonesia sebagai Dewan Keamanan PBB tidak tetap pada tahun 2019. Hal tersebut juga akan memperkuat diplomasi pertahanan yang dicanangkan oleh Indonesia. Di samping itu Indonesia akan lebih konsisten terhadap keikutsertaannya dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia jika memiliki target yang terencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, D. (2013). Indonesia Dan Misi Perdamaian PBB: Tinjauan Diplomasi dan Politik Luar Negeri. *Institute Of International Studies UGM*.
- Alvian, R. A. (2018). Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2), 148-163.
- Ariestianti, B. T. (2014). TNI dan Perwujudan Perdamaian Dunia. *Majalah Wira*, 15-23.
- Bappenas. (2006). Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. *Bappenas Bab 7 Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional*, bab 7.
- Berridge, G. R. (2001). *A Dictionary of Diplomacy*. Hampshire, UK: Palgrave.
- Blannin, P. (2017). Defence Diplomacy in The Long War 2(1-2). *Brill Research Perspectives in Diplomacy and Foreign Policy*, 2(1-2), 1-163.
- Booth, K. (2007). *Theory of world security (Vol. 105)*. New York: Cambridge University Press.

- BPK. (2006, September 9). *Keputusan Presiden*. Diambil kembali dari peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/55511/keppres-no-15-tahun-2006>
- Bratawijaya, A. (2008). PENYELESAIAN KONFLIK HIZBULLAH – ISRAEL DI LIBANON OLEH PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL. *Anz Doc*, 39-41.
- Buzan, B. &. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security (Vol. 91)*. New York: Cambridge University Press.
- Buzan, B. &. (2009). *The evolution of international security studies*. New York: Cambridge University Press.
- Cottey, A. &. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. London: Routledge.
- Drab, L. (2018). Defence Diplomacy – An Important Tool For The Implementation of Foreign Policy and Security of The State. *Security and Defence Quarterly*, 20(3), 57-71.
- Dwi Apriyanti, Y. (2020). KEBIJAKAN INDONESIA MENGELUARKAN ROADMAP VISION 4000 PEACEKEEPERS 2015-2019 PADA UN-PKO (UNITED NATION –PEACEKEEPING OPERATION). *JOM FISIP Vol. 7: &: Edisi II Juli-Desember 2020*, 2-7.
- Elgar, D. G. (2020). Dasar-Dasar Hukum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Ikut Sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Jurnal UNTAG*, 17-30.
- Firman, T. (2017, Februari 17). *Hizbullah di Lebanon dan Rembetan Konflik Sektarian Suriah*. Diambil kembali dari tirto.id: <https://tirto.id/hizbullah-di-lebanon-dan-rembetan-konflik-sektarian-suriah-cjHM>
- Greater, J. (2016, September 4). *Hubungan Militer Indonesia Lebanon Menguat*. Diambil kembali dari jakartagreater.com: <https://jakartagreater.com/92147/hubungan-militer-indonesia-lebanon-menguat/>
- Gumilar, N. L. (2018). Gumilar, N., Legionosuko Pengiriman Pasukan Garuda Sebagai Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Rangka Peningkatan Alutsista Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 3(3), 85-97.
- Hananto, A. (2020, Agustus 7). *Lebanon, Negara Ke-3 yang Mengakui Kemerdekaan Republik Indonesia*. Diambil kembali dari goodnewsfromindonesia.id: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/08/07/lebanon-negara-ke-3-yang-mengakui-kemerdekaan-republik-indonesia>
- Hanlon, R. J. (2016). *Freedom from Fear, Freedom from Want: An Introduction to Human Security*. Toronto: University of Toronto Press.
- Haryono, E. (2017, Oktober 17). *Politik Luar Negeri 3 Tahun Pemerintahan Jokowi*. Diambil kembali dari mediaindonesia.com: <https://mediaindonesia.com/opini/127568/politik-luar-negeri-tiga-tahun-pemerintahan-jokowi>
- Hills, A. (2000). Defence Diplomacy and Security Sector Reform. *Contemporary Security Policy*, 21(1), 46-67.
- Hutabarat, L. F. (2015). Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11(1), 49-52.
- Itjen Kemenag. (2004, November 30). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Diambil kembali dari itjen.kemenag.go.id: <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/1559-34-undang-undang-nomor-34-tahun-2004-tentang-tentara-nasional-indonesia>

- JDIH Kemenkeu. (2008, Januari 26). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara*. Diambil kembali dari jdih.kemenkeu.go.id:
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/7TAHUN2008PERPRES.HTM>
- Kartini, I. (2012). Peran Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. *Jurnal Pertahanan*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, September 16). *Lebanon Bersyukur Miliki Pasukan Perdamaian Garuda di Perbatasan Israel*. Diambil kembali dari kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/beirut/id/news/2437/lebanon-bersyukur-miliki-pasukan-perdamaian-garuda-di-perbatasan-israel>
- Kemhan. (2016, Januari 27). *Pasukan Penjaga Perdamaian dari Indonesia Yang Bertugas di Lebanon Adalah Pasukan Terbesar di UNIFIL*. Diambil kembali dari kemhan.go.id: <https://www.kemhan.go.id/2016/01/27/pasukan-penjaga-perdamaian-dari-indonesia-yang-bertugas-di-lebanon-adalah-pasukan-terbesar-di-unifil.html>
- Kemlu. (2018). *Profil Negara dan Kerjasama*. Diambil kembali dari kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/beirut/id/read/profil-negara-dan-kerjasama/3490/etc-menu>
- Kemlu. (2019, September 16). *Lebanon Bersyukur Miliki Pasukan Perdamaian Garuda di Perbatasan Israel*. Diambil kembali dari kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/beirut/id/news/2437/lebanon-bersyukur-miliki-pasukan-perdamaian-garuda-di-perbatasan-israel>
- Kemlu. (2019, September 16). *Lebanon Bersyukur Miliki Pasukan Perdamaian Garuda di Perbatasan Israel*. Diambil kembali dari kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/beirut/id/news/2437/lebanon-bersyukur-miliki-pasukan-perdamaian-garuda-di-perbatasan-israel>
- Kemlu. (2019, September 16). *Lebanon Bersyukur Miliki Pasukan Perdamaian Garuda di Perbatasan Israel*. Diambil kembali dari kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/beirut/id/news/2437/lebanon-bersyukur-miliki-pasukan-perdamaian-garuda-di-perbatasan-israel>
- Laksmana, E. (2011). FROM 'BOOTS' TO 'BROGUES': THE RISE OF DEFENCE DIPLOMACY IN SOUTHEAST ASIA. *S. Rajaratnam School of International Studies*, 71-89.
- Madjid, A. e. (2017). PERAN PRE DEPLOYMENT TRAINING DI PUSAT MISI. *Unhan Press*, 1-55.
- Masys, A. J. (2016). *Exploring the Security Landscape: Non-Traditional Security Challenges*. Leicester, UK: Springer.
- Maulana, H. (2018). PERAN PASUKAN PERDAMAIAN INDONESIA DALAM MISI KEAMANAN DI LEBANON 2006-2012. *SOSIAL POLITIK & EKONOMI*, 7-25.
- McCormack, K. T. (2008). *Yearbook of International Humanitarian Law - 2006*. T.M.C Asser Press.
- Murwanto, I. P. (2020). INDONESIA'S COMMITMENT TO THE UNITED NATIONS PEACEKEEPING OPERATIONS IN CONSTRUCTIVIST PERSPECTIVE: CASE STUDY OF ROADMAP VISION 4,000 PEACEKEEPERS 2015-2019 POLICY. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 6(3), 342-356.
- Park, K. A. (2013). *Non-Traditional Security Issues in North Korea*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Prasetyo, T. B. (2018). Diplomasi Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Total R. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(2), 165-184.

- Puspen TNI. (2015, Desember 17). *Kontingen Garuda 2014-2015 Akhiri Misi Perdamaian di Lebanon*. Diambil kembali dari <https://www.tni.mil.id/https://www.tni.mil.id/view-88787-kontingen-garuda-2014-2015-akhiri-misi-perdamaian-di-lebanon.html>
- Puspen TNI. (2015, Desember 17). *Kontingen Garuda 2014-2015 Akhiri Misi Perdamaian di Lebanon*. Diambil kembali dari <https://www.tni.mil.id/https://www.tni.mil.id/view-88787-kontingen-garuda-2014-2015-akhiri-misi-perdamaian-di-lebanon.html>
- Rachmat, A. N. (2016). Diplomasi Publik Indonesia melalui Kontingen Garuda/UNIFIL Tentara Nasional Indonesia di Lebanon Selatan. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 1-14.
- Raco, D. J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Dalam *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (hal. 2). Cikarang: Grasindo.
- RI, D. U. (2021). *Keputusan Presiden No 15 Tahun 2006*. Diambil kembali dari [jdih.bpk.go.id: https://jdih.bpk.go.id/?p=26758](https://jdih.bpk.go.id/https://jdih.bpk.go.id/?p=26758)
- Samaan, J. (2014). FROM WAR TO DETERRENCE?: ISRAEL-HEZBOLLAH CONFLICT SINCE 2006. *Strategic Studies Institute, US Army War College*, 1-5.
- Šehović, A. B. (2018). *Reimagining State and Human Security Beyond Borders*. Cham: Palgrave Pivot.
- Setiawati, D. S. (2017). Dilemma Indonesia Dan Hambatan Asean Untuk Menjalankan Peranan Dalam Penyelesaian Konflik Timur Tengah. *Jurnal Hukum UII*, 1-3.
- Siar News Service. (1999, September 21). *TNI Watch!---IRONI PASUKAN PBB: LUPAKAN KEJAYAAN KONTINGEN GARUDA*. Dipetik 08 12, 2021, dari Mail-Archive: <https://www.mail-archive.com/siarlist@minipostgresql.org/msg02089.html>
- Singh, B. &. (2011). FROM 'BOOTS' TO 'BROGUES': THE RISE OF DEFENCE DIPLOMACY IN SOUTHEAST ASIA. *S. Rajaratnam School of International Studies*, 1-17.
- Situmorang, M. (2015). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 68-71.
- Soleman, M. &. (2017). Nawacita sebagai strategi khusus Jokowi periode Oktober 2014-20 Oktober 2015. *POLITIK*, 13(1), 1-15.
- Sudirman, Z. P. (2019). Peran Korps Wanita TNI sebagai Pasukan Pemeliharaan. *Universitas Padjajaran*, 134.
- Supardi, C. (2017). Keterlibatan Indonesia Dalam Pasukan Operasi Pengawasan-Perdamaian PBB Pada Konflik Israel-Hezbollah di Lebanon 2006-2014. *Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah*, 1-3.
- Susetyo, H. S. (2008). *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*. Jakarta: Esa Unggul University.
- Wardoyo, B. (2015). *Perkembangan, Paradigma, dan Konsep Keamanan Internasional & Relevansinya untuk Indonesia*. Klaten: Nugra Media.
- Zimmerman, E. (2016). *Think Tanks and Non-Traditional Security: Governance Entrepreneurs in Asia*. London: Palgrave Macmillan.